

RENCANA KERJA (RENJA)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2025



DISUSUN OLEH:

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diwajibkan untuk menyiapkan dan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, berpedoman kepada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

Dalam Penyusunan Renja ini, diuraikan hal-hal yang menjadi tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, pendanaan dan indikator kinerja dari masing-masing satuan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 8 (delapan) biro. Oleh karena itu Renja Tahun 2025 perlu disusun sebagai komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh satuan unit kerja.

Demikian Renja Tahun 2025 ini disusun sebagai penjabaran RKPD Tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tanjungpinang, Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Adi Prihantara



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	59
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	 64
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	69
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	113
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	117
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	117
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	118
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	121
BAB V PENUTUP	171
5.1 Catatan Penting	171
5.2 Kaidah Pelaksanaan	171
5.3 Rencana Tindak Lanjut	172



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Provinsi Kepulauan Riau.	11
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	62
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	70
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Kepulauan Riau.....	114
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	120
Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	123



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;



- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Renja SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya.

Bagi Sekretariat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyempurnakan Renja SKPD dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2025. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2025, RPJP Provinsi Kepulauan Riau, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, dan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Sebagai rancangan awal dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh



karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan perangkat daerah. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman awal dalam penetapan RKPD dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan RAPBD.

Selanjutnya Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renja SKPD melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah maupun Musrenbang RKPD yang kedepannya dijadikan acuan dalam penyusunan RKA SKPD dan kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta



Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) *juncto* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran



Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 981).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah di Tahun 2025.



Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai acuan dalam menyusun dan menetapkan dokumen Rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025;
2. Mengetahui kinerja Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau periode tahun sebelumnya;
3. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan rancangan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah pada Tahun 2025;
4. Memprakirakan usulan maju program dan kegiatan yang berkelanjutan pada Tahun 2025;
5. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 berdasarkan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025; dan
6. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan drat awal Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 dan dasar penyusunan draft awal Rencana Aksi Kinerja (RAK) serta Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 serta menjadi acuan awal penyusunan *Logical Framework* atau Pohon Kinerja Tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.



BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Bab II berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Bab III berisi tentang Telaah Terhadap Kebijakan Nasional. Tujuan dan Sasaran Renja.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab IV menguraikan rencana program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilengkapi dengan indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB V. PENUTUP

Bab V berisi penutup, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian Renja tahun 2023 dan perkiraan pencapaian Renja tahun 2024. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2023 secara umum Sekretariat Daerah telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi walaupun ada beberapa indikator kinerja yang tidak mencapai target yang sudah ditetapkan.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya, dalam evaluasinya dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa sumber dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.



B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2023

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 8 program dengan 30 kegiatan dan 214 sub kegiatan. Pagu dana yang dikelola Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada saat itu adalah sebesar Rp. 364.644.027.435,-. Oleh karena terjadi perubahan asumsi penerimaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 maka di beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah mengalami penambahan pagu anggaran. Maka secara keseluruhan pagu Perubahan APBD T.A. 2023 di Sekretariat Daerah naik menjadi Rp. 384.598.257.188,- atau mengalami kenaikan pagu sekitar Rp. 19.954.229.5753,- (5,47%) dari pagu APBD Murni T.A. 2023. Adapun realisasi keuangan di akhir tahun 2023 sebesar Rp. 369.471.923.587 atau sekitar 96,07%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.

C. Perkiraan Capaian Tahun Anggaran 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 8 program dengan 30 kegiatan dan 107 sub kegiatan. Pagu dana yang dikelola adalah sebesar Rp 394.126.534.003,-. Perkiraan capaian pada tahun 2024 diperkirakan akan sama kondisinya seperti tahun 2023 selama tidak terjadi kejadian luar biasa seperti pandemi dan lainnya. Oleh karena itu belum dapat diperkirakan berapa persentase pasti realisasi keuangan dan fisiknya. Namun dengan semakin menurunnya kasus Covid-19 dan semakin disiplinnya masyarakat Kepulauan Riau termasuk ASN di



lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maka diperkirakan capaian pada Tahun 2024 akan lebih maksimal selama tidak ada kebijakan terkait rasionalisasi secara signifikan yang pada akhirnya menurunkan capaian kinerja secara keseluruhan

Evaluasi pelaksanaan Renja seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, Tahun 2024 dan perkiraan capaian realisasi target Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau diuraikan dalam tabel 2.1

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Kepulauan Riau

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
X	XX	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah	%	100	93	95	95	100%	100	100	100%	Sekretariat Daerah
X	XX	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Sekretariat Daerah
X	XX	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30	6	6	6	100%	6	18	60%	Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
X	XX	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	1	0	0	0%	1	2	50%	Biro Kesejahteraan Rakyat
X	XX	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
X	XX	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	2	2	2	100%	2	6	60%	Biro Administrasi Pimpinan
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	2	2	2	100%	0	4	66.67%	Biro Perekonomian dan Pembangunan

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	2	2	2	100%	2	6	50%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	2	2	2	100%	2	6	60%	Biro Hukum
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	0	2	2	100%	2	4	50%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	0	2	2	100%	1	3	60%	Biro Kesejahteraan Rakyat
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	2	2	2	100%	2	6	60%	Biro Organisasi
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	2	2	2	100%	2	6	60%	Biro Umum
X	XX	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
X	XX	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Biro Umum
X	XX	1	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	20482	3990	4480	4480	100%	3962	12432	60.70%	Biro Umum
X	XX	1	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
X	XX	1	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	9	1	1	1	100%	1	3	33.33%	Biro Umum
X	XX	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Biro Umum
X	XX	1	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
X	XX	1	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	
X	XX	1	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	12	6	6	6	100%	0	12	100%	Biro Umum
X	XX	1	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					21			12			
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	9	0	3	3	100%	0	3	33.33%	Biro Administrasi Pimpinan
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	9	2	1	1	100%	0	3	33.33%	Biro Perekonomian dan Pembangunan

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	10	0	3	3	100%	0	3	30%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	8	0	2	2	100%	0	2	25%	Biro Hukum
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	11	0	5	5	100%	4	9	81.82%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	8	1	1	1	100%	2	4	50%	Biro Kesejahteraan Rakyat
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Organisasi
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	25	3	5	5	100%	5	13	52%	Biro Umum
X	XX	1	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
X	XX	1	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			673	137	109	109	100%	91	337	50.07%	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	273	100	70	70	100%	20	190	69.60%	Biro Administrasi Pimpinan
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	70	15	10	10	100%	0	25	35.71%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	95	0	5	5	100%	0	5	5.26%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	13	0	1	1	100%	0	1	7.69%	Biro Hukum
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	66	2	5	5	100%	45	52	78.79%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	0	0	0	0%	10	10	33.33%	Biro Kesejahteraan Rakyat
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	16	0	3	3	100%	3	6	37.50%	Biro Organisasi
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	110	20	15	15	100%	13	48	43.64%	Biro Umum
X	XX	1	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			790	180	170	170	100%	100	450	56.96%	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	120	30	30	30	100%	0	60	50%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	210	80	0	0	0%	50	130	61.90%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	140	0	40	40	100%	0	40	28.57%	Biro Hukum

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	320	70	100	100	100%	50	220	68.75%	Biro Umum
X	XX	1	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		335	60	60	60	100%	50	170	50.75%	Biro Umum
X	XX	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	
X	XX	1	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			15	2	2	2	100%	2	6	15	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	11	1	1	1	100%	1	3	27.27%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	1	1	1	100%	1	3	75%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
X	XX	1	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			49	7	8	8	100%	8	23	46.94%	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	21	5	4	4	100%	4	13	61.90%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	17	1	2	2	100%	2	5	29.41%	Biro Hukum
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	0	1	1	100%	1	2	50%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	7	1	1	1	100%	1	3	42.86%	Biro Umum
X	XX	1	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			27	4	4	4	100%	3	11	40.74%	

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Administrasi Pimpinan
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	3	1	0	0	0%	0	1	33.33%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	9	0	1	1	100%	0	1	11.11%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			58	8	13	13	100%	9	30	52%	

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Administrasi Pimpinan
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	15	1	5	5	100%	1	7	46.67%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	13	1	2	2	100%	2	5	38.46%	Biro Hukum
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Organisasi
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			49	7	8	8	100%	8	23	46.94%	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Administrasi Pimpinan
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	11	1	1	1	100%	1	3	27.27%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	13	1	2	2	100%	2	5	38.46%	Biro Hukum

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Organisasi
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			29	5	4	4	100%	4	13	44.83%	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	3	1	0	0	0%	0	1	33.33%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	11	1	1	1	100%	1	3	27.27%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Organisasi
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			26	4	4	4	100%	4	12	46.15%	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	11	1	1	1	100%	1	3	27.27%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Hukum
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			46	8	8	8	100%	8	24	52.17%	

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Administrasi Pimpinan
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	11	1	1	1	100%	1	3	27.27%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Hukum
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Kesejahteraan Rakyat
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Organisasi
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
X	XX	1	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	
X	XX	1	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	6	3	0	0	0%	1	4	66.67%	Biro Umum
X	XX	1	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	236	67	49	49	100%	60	176	74.58%	Biro Umum
X	XX	1	1.07	0005	Pengadaan Mebel			45	4	5	5	100%	8	17	37.78%	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	1	0	0	0%	0	1	33.33%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	16	0	1	1	100%	3	4	25%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10	0	0	0	0%	2	2	20%	Biro Hukum
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	0	1	1	100%	1	2	50%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	7	2	2	2	100%	1	5	71.43%	Biro Kesejahteraan Rakyat
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			211	28	65	65	100%	30	123	58.29%	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	60	0	20	20	100%	8	28	46.67%	Biro Administrasi Pimpinan
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	4	1	1	1	100%	0	2	50%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	17	0	6	6	100%	4	10	58.82%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	27	5	1	1	100%	15	21	77.78%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	56	20	17	17	100%	2	39	69.64%	Biro Kesejahteraan Rakyat
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	47	2	20	20	100%	1	23	48.94%	Biro Organisasi
X	XX	1	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	3	0	1	1	100%	0	1	33.33%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
X	XX	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	
X	XX	1	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			29	7	5	5	100%	5	17	58.62%	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Administrasi Pimpinan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	1	0	0	0%	0	1	33.33%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Hukum

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	0	0	0%	0	1	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			33	5	5	5	100%	7	17	51.52%	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Administrasi Pimpinan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	7	1	1	1	100%	1	3	42.86%	Biro Hukum
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	3	0	0	0	0%	1	1	33.33%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	3	0	0	0	0%	1	1	33.33%	Biro Organisasi
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35	7	7	7	100%	7	21	60%	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Administrasi Pimpinan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Kesejahteraan Rakyat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Organisasi
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			40	8	8	8	100%	8	24	60%	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Administrasi Pimpinan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Perekonomian dan Pembangunan

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Hukum
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Kesejahteraan Rakyat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Organisasi
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
X	XX	1	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			390	63	74	74	100%	85	222	56.92%	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	8	0	2	2	100%	2	4	50%	Biro Administrasi Pimpinan
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	60	12	12	12	100%	12	36	60%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	25	5	5	5	100%	5	15	60%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6	0	2	2	100%	2	4	66.67%	Biro Hukum

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	51	2	4	4	100%	15	21	41.18%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	28	1	6	6	100%	7	14	50%	Biro Kesejahteraan Rakyat
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	20	4	4	4	100%	4	12	60%	Biro Organisasi
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	192	39	39	39	100%	38	116	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			993	212	210	210	100%	189	611	61.53%	

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	2	0	0	0%	0	2	33.33%	Biro Hukum
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	987	210	210	210	100%	189	609	61.70%	Biro Umum
X	XX	1	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1347	140	142	142	100%	350	632	46.92%	Biro Umum
X	XX	1	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			490	42	84	84	100%	83	209	42.65%	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	218	0	46	46	100%	42	88	40.37%	Biro Administrasi Pimpinan
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	10	2	2	2	100%	2	6	60.00%	Biro Perekonomian dan Pembangunan

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	18	1	1	1	100%	6	8	44.44%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	112	20	20	20	100%	12	52	46.43%	Biro Hukum
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	67	14	10	10	100%	10	34	50.75%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	40	0	0	0	0%	6	6	15.00%	Biro Organisasi
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	25	5	5	5	100%	5	15	60.00%	Biro Umum
X	XX	1	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			46	6	13	13	100%	13	32	69.57%	

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	13	0	7	7	100%	6	13	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	33	6	6	6	100%	7	19	57.58%	Biro Umum
X	XX	1	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			102	19	21	20	95%	20	59	57.84%	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	0	1	0	0%	0	0	0%	Biro Administrasi Pimpinan
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	0	1	1	100%	1	2	50%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	90	18	18	18	100%	18	54	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	0	0	0	0%	0	0	0%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
X	XX	1	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Biro Umum
X	XX	1	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	140	28	28	28	100%	28	84	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	18	2	2	2	100%	2	6	33.33%	Biro Umum

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
X	XX	1	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	10	2	2	2	100%	2	6	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	120	24	24	24	100%	24	72	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Biro Umum
X	XX	1	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum
X	XX	1	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
X	XX	1	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	
X	XX	1	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang disiapkan	Dokumen	1108	532	573	573	100%	1	1106	99.82%	Biro Administrasi Pimpinan
X	XX	1	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			16	2	2	2	100%	4	8	50%	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Administrasi Pimpinan
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	3	0	0	0	0%	1	1	33.33%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	3	0	0	0	0%	1	1	33.33%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Umum

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
X	XX	1	1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Administrasi Pimpinan
X	XX	1	1.14		Fasilitas Keprotokolan	Persentase Fasilitas Keprotokolan sesuai SOP	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Biro Administrasi Pimpinan
X	XX	1	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Administrasi Pimpinan
X	XX	1	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Administrasi Pimpinan
X	XX	1	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Administrasi Pimpinan
4	01	02			Program Penataan Organisasi	Persentase Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	%	44.60	45.17	40.10	40.10	100%	41.60	45.17	101.28%	Biro Organisasi

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Biro Organisasi
4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Organisasi
4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Organisasi
4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Organisasi
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Biro Organisasi
4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Organisasi
4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Organisasi
4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Organisasi

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Organisasi
4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Organisasi
4	01	03			Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau	Skor	3.06	3.42	3.04	3.04	100%	3.04	3.42	111.76%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	01	03	1.01	0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	01	03	1.01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	01	03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4	01	03	1.03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	01	04	1.01		Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	%	100	20	40	40	100%	60	60	60%	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	Lembaga	30	6	6	6	100%	6	18	60%	Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	01	04	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4	01	05			Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Biro Hukum
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Biro Hukum
4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	11	1	1	1	100%	1	3	27.27%	Biro Hukum
4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	11	1	1	1	100%	1	3	27.27%	Biro Hukum
4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang didokumentasi dan dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	9	1	1	1	100%	1	3	33.33%	Biro Hukum
4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	Dokumen	9	1	1	1	100%	1	3	33.33%	Biro Hukum
4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Biro Hukum
4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang diselesaikan	Kasus	40	6	10	10	100%	8	24	60%	Biro Hukum

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	Kasus	28	5	5	5	100%	6	16	57.14%	Biro Hukum
4	01	06			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase koordinasi pada penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah	%	100	n/a	80	80	100%	90	90	90	Biro Perekonomian dan Pembangunan
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Perekonomian dan Pembangunan

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
4	01	06	1.02	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
4	01	06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Biro Perekonomian dan Pembangunan

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4	01	06	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
4	01	06	1.03	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
4	01	06	1.03	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	3	1	0	0	0%	0	1	33%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
4	01	08			Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase regulasi tentang pelaksanaan APBD yang disusun	%	100	90	92	92	100%	95	95	95%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Biro Perekonomian dan Pembangunan

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan	4	1	1	1	100%	0	2	50%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
4	01	08	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan	4	1	1	1	100%	0	2	50%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
4	01	08	1.02	0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Dokumen	4	1	1	1	100%	0	2	50%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
4	01	08	1.02	0001	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Biro Perekonomian dan Pembangunan

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4	01	08	1.02	0001	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	4	1	1	1	100%	0	2	50%	Biro Perekonomian dan Pembangunan
4	01	07			Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	71	11.43	8.3	8.3	100%	70	70	99%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	27	1	1	1	100%	1	3	11.11%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	27	1	1	1	100%	1	3	11.11%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	27	1	1	1	100%	1	3	11.11%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	27	1	1	1	100%	1	3	11.11%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	27	1	1	1	100%	1	3	11.11%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	27	1	1	1	100%	1	3	11.11%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	105	7	7	7	100%	10	24	22.86%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	27	1	1	1	100%	1	3	11.11%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
										Target Kinerja Renja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
1					2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	26	1	1	1	100%	0	2	7.69%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa



2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, dipimpin Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajiban tersebut Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d) Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Instansi daerah; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Maka secara umum tolok ukur keberhasilan serta akuntabilitas kinerja program dan kegiatan pelayanan pada tiap biro di lingkungan sekretariat daerah adalah:

- 1) Produktifitas serta kualitas perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah daerah yang relevan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 2) Kapasitas koordinasi, pembinaan administratif dan aparatur, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan pemerintah daerah tersebut dalam tugas pokok dan fungsi perangkat daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- 3) Kapasitas dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah.

Peluang dan hambatan pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menjadi tumpuan untuk menyusun kinerja pelayanan 1 (satu) tahun



kedepan. Hambatan yang dihadapi dapat berasal dari internal organisasi maupun lingkungan eksternal lainnya. Sementara perubahan strategis dalam skala regional, nasional dan internasional mampu memberikan peluang pengoptimalan pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah.

A. Peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah antara lain, yaitu:

1. Kuantitas Sumber Daya Aparatur yang mencukupi;
2. Komitmen Pimpinan;
3. Adanya kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan Good Governance;
4. Adanya kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan E-Government;
5. Adanya kebijakan Pemerintah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
6. Adanya kebijakan Pemerintah untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Sarana dan Prasarana yang tersedia.

B. Sedangkan hambatan dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah antara lain, yaitu:

1. Kualitas sumber daya aparatur yang masih belum memadai;
2. Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. Tuntutan pelayanan birokrasi menghendaki aparatur yang semakin profesional dan kompeten;
4. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin efektif dan efisien;
5. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu;
6. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;
7. Efisiensi, efektifitas dan produktivitas belum optimal;
8. Transparansi dan akuntabilitas birokrasi belum memadai;
9. Disiplin dan kinerja aparatur kurang optimal;
10. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan.



Secara umum pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel 2.2 terlampir.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

No.	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase kebutuhan pimpinan daerah dan perangkat daerah yang difasilitasi	N/A	N/A	97%	100%	100%	100%	97%	N/A	100%	100%	Realisasi Capaian Tahun 2023 mencapai target
2	Persentase layanan keprotokolan dan penyiapan materi serta dokumentasi pimpinan yang difasilitasi	N/A	N/A	97%	98%	99%	100%	97%	N/A	99%	100%	Realisasi Capaian Tahun 2023 mencapai target
3	Persentase peningkatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah	N/A	N/A	79%	86%	93%	100%	79%	N/A	93%	100%	Realisasi Capaian Tahun 2023 mencapai target
4	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah yang difasilitasi	N/A	N/A	N/A	95%	98%	100%	N/A	N/A	98%	100%	Realisasi Capaian Tahun 2023 tidak dapat diukur karena 2024 menggunakan indikator sasaran baru

No.	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	40%	60%	80%	100%	40%	N/A	80%	100%	Realisasi Capaian Tahun 2023 mencapai target
6	Persentase produk hukum daerah dan kasus hukum daerah yang difasilitasi	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	Realisasi Capaian Tahun 2023 mencapai target
7	Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan yang dihasilkan	N/A	N/A	86%	92.3%	93.5%	100%	86%	N/A	93.5%	100%	Realisasi Capaian Tahun 2023 mencapai target
8	Indeks Tata Kelola Tata Pengadaan	N/A	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	N/A	Baik	Baik	Realisasi Capaian Tahun 2023 mencapai target



2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selaku institusi yang memberikan *supporting system* kepada Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran sentral mengkoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, penatalaksanaan organisasi, serta memberikan fasilitasi administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Untuk itu Sekretariat Daerah harus mampu mengukur kinerja pelayanan yang sudah dilaksanakan, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan, serta mengetahui tantangan atau peluang yang dimiliki dan memformulasikan isu-isu penting yang merupakan rekomendasi atau catatan strategis untuk diaplikasikan dalam program dan kegiatan akan dilaksanakan. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Tingkat Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah tahun 2023 dapat di kategorikan sangat baik, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah capaian kinerja pada tahun 2023 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Sangat Baik ($>100\%$) sebanyak 6 indikator kinerja
- Baik ($75\% < X \leq 100\%$) sebanyak 2 indikator kinerja
- Cukup Baik ($55\% < X < 75\%$) tidak ada
- Kurang Baik ($<55\%$) tidak ada

B. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu



diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* and *clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Secara umum, isu-isu penting yang dihadapi antara lain:

1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah belum optimal;
2. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan dan pengelolaan keuangan belum berjalan optimal;
3. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efisien dan efektif;
4. Belum optimalnya seluruh rangkaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
5. Penyusunan Perencanaan Daerah dan Pengelolaan Keuangan melalui Penatausahaan Keuangan Daerah belum terintegrasi dengan baik;
6. Pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap Biro belum optimal;
7. Penyederhanaan birokrasi yang belum diatur secara terinci melalui peraturan perundang-undangan
8. Masih terdapat beberapa biro yang belum tepat fungsi dan tepat ukur termasuk uraian tugasnya;
9. Penyiapan produk hukum daerah belum disusun secara aktual
10. Sistem perencanaan, penganggaran dan sistem akuntabilitas kinerja belum terintegrasi secara sinergi;
11. Kompetensi sumber daya aparatur yang masih rendah dan distribusi sumber daya aparatur yang belum merata;

12. Belum optimalnya koordinasi baik antar biro maupun antara biro dengan asisten, sehingga pelaksanaan tugas keseluruhan Sekretariat Daerah kurang sinergis dan tidak terkoordinir dengan baik;
13. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait isu-isu penting diatas dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan pada masing-masing Biro sebagai berikut:

- Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - Belum optimalnya asistensi, supervisi, konfirmasi dan reviu terhadap penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota;
 - Belum optimalnya pengurusan administrasi izin perjalanan dinas luar negeri bagi Kepala Daerah, DPRD dan seluruh ASN;
 - Belum optimalnya dalam pengurusan administrasi pemilu (DPRD dan DPD) dan Pemilu Kepala Daerah;
 - Belum optimalnya fasilitasi Daerah Otonomi Baru (DOB);
 - Belum optimalnya fasilitasi kegiatan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan;
 - Belum optimalnya fasilitasi kegiatan kerja sama dalam negeri dan luar negeri;
 - Belum optimalnya asistensi, monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi dan Kab/Kota
 - Belum optimalnya implementasi peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP);
 - Belum optimalnya sumber daya manusia (SDM) pengelola Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (LKPJ) pada perangkat daerah;
 - Belum optimalnya fasilitasi pemekaran Kecamatan, Kelurahan dan perubahan status Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau;
 - Belum optimalnya fasilitasi penataan wilayah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;



- Belum optimalnya fasilitasi dan inventarisir unsur rupa bumi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau
- Biro Hukum
 - Belum optimalnya koordinasi SKPD dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan produk hukum daerah;
 - Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan di atasnya;
 - Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya pendidikan pelatihan bagi SDM penyusun produk hukum daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
 - Bantuan Hukum kepada Masyarakat dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang belum memadai
- Biro Kesejahteraan Rakyat
 - Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - Belum tersusunnya database di bidang keagamaan secara aktual;
 - Belum tersusunnya regulasi/kebijakan bidang kesejahteraan rakyat secara rinci dan mendasar terutama terkait pelaksanaan hibah/bansos keagamaan;
 - Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
- Biro Perekonomian dan Pembangunan
 - Masih rendahnya koordinasi, sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait dalam penyusunan kebijakan di bidang perekonomian daerah;
 - Masih adanya kebijakan perekonomian yang sudah dihasilkan namun belum diimplementasikan dan ditindaklanjuti;
 - Belum optimalnya kinerja BUMD dan BLUD akibat masih minimnya kebijakan daerah dalam mendukung peningkatan kinerja BUMD dan BLUD;



- Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan;
- Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN.
- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur Biro Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- **Biro Pengadaan Barang dan Jasa**
 - Masih kurangnya kuantitas sumberdaya aparatur pelaksana pengadaan barang/jasa sehingga pendampingan kepada SKPD terkait proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi tidak maksimal;
 - Belum optimalnya kapasitas sumberdaya aparatur pelaksana pengadaan barang/jasa dalam memahami aturan terbaru terkait pengadaan/barang jasa Pemerintah;
 - Masih minimnya kebijakan terkait peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur pelaksana pengadaan barang dan jasa;
 - Belum optimalnya koordinasi, monitoring dan pengawasan terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
 - Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah sesuai prinsip-prinsip pengadaan;
 - Belum maksimalnya pengelolaan dan pengembangan pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik.
- **Biro Umum**
 - Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - Belum optimalnya pengelolaan aset di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur Biro Umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.



- Biro Organisasi
 - Belum sepenuhnya terinternalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi keseluruhan unit kerja;
 - Masih terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Aparatur sesuai kebutuhan organisasi yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - Ketidakeimbangan alokasi aparatur Biro Organisasi dengan beban kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- Biro Administrasi Pimpinan
 - Belum optimalnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat;
 - Belum optimalnya kapasitas sumberdaya aparatur Biro Administrasi Pimpinan di bidang pelayanan kedinasan KDh/WKDh;
 - Belum optimalnya kualitas pelayanan dan tata kelola dokumentasi dan materi pimpinan serta keprotokolan;
 - Masih rendahnya kuantitas dan kualitas aparatur Biro Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau termasuk Perangkat Daerah prioritas perumusan misi untuk mewujudkan visi di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sesuai dengan tema RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 “Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan Dalam Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan”.

Perbandingan alokasi pagu indikatif dalam rancangan awal RKPD Tahun 2025 (Pagu RPJM/Renstra) terhadap pagu kebutuhan berdasarkan analisis masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah	100	307,758,078	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah	100	307,758,078	Sekretariat Daerah	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	3,171,294	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	3,171,294	Sekretariat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	763,087	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	763,087		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	452,467		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	452,467	Biro Administrasi Pimpinan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	310,620		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	310,620	Biro Kesejahteraan Rakyat	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	250,854	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	250,854	Biro Kesejahteraan Rakyat	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	217,456	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	217,456	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			15	1,731,669	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			15	1,731,669		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	35,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	35,000	Biro Administrasi Pimpinan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	273,889		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	273,889	Biro Perekonomian dan Pembangunan	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	150,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	150,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	150,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	150,000	Biro Hukum	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	100,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	100,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	170,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	170,000	Biro Kesejahteraan Rakyat	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	608,205		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	608,205	Biro Organisasi	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	244,575		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	244,575	Biro Umum	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	208,228	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	208,228	Biro Administrasi Pimpinan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	78,688,752	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	78,688,752	Biro Umum	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3990	73,797,569	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3990	73,797,569	Biro Umum	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	3,772,429	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	3,772,429	Biro Umum	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	624,227	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	624,227	Biro Umum	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	246,001	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	246,001	Biro Umum	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	67,600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	67,600	Biro Umum	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	67,600	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	67,600	Biro Umum	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	3	113,326	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	3	113,326	Biro Umum	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	1,909,516	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	1,909,516	Biro Umum	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	55,002	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	55,002	Biro Umum	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	936,151	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	936,151	Biro Umum	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	169,986	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	169,986	Biro Umum	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	66,848	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	66,848	Biro Umum	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	681,528	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	681,528	Biro Umum	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	5,410,962	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	5,410,962		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			22	1,843,830	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			22	1,843,830		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	350,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	350,000	Biro Administrasi Pimpinan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	170,630		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	170,630	Biro Perekonomian dan Pembangunan	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	200,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	200,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	100,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	100,000	Biro Hukum	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	250,527		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	250,527	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	190,436		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	190,436	Biro Organisasi	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6	581,237		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6	581,237	Biro Umum	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			2	416,489	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			2	416,489		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	216,489		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	216,489	Biro Umum	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	200,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	200,000	Biro Administrasi Pimpinan	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			162	1,808,188	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			162	1,808,188		
		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	39	350,000		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	39	350,000	Biro Administrasi Pimpinan	
		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	190,221		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	190,221	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45	157,500		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45	157,500	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	80,000		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	80,000	Biro Hukum	
		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	50,000		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	50,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	400,273		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	400,273	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	230,000		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	230,000	Biro Organisasi	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	350,195		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	350,195	Biro Umum	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			170	705,282	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			170	705,282		
		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30	166,537		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30	166,537	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	75,000		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	75,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	210,000		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	210,000	Biro Hukum	
		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	253,745		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	253,745	Biro Umum	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			190	637,172	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			190	637,172		
		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	75,000		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	75,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	150,000		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	150,000	Biro Administrasi Pimpinan	
		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	150,000		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	150,000	Biro Hukum	
		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80	262,172		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80	262,172	Biro Umum	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	54,620,771	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	54,620,771		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5	52,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5	52,000		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	50,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	50,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	2,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	2,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13	7,792,614	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13	7,792,614		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	120,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	120,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6	300,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6	300,000	Biro Hukum	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	83,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	83,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2	7,289,614		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2	7,289,614	Biro Umum	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			9	2,222,031	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			9	2,222,031		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	282,460		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	282,460	Biro Administrasi Pimpinan	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	110,676		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	110,676	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5	100,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5	100,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	30,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	30,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	1,698,895		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	1,698,895	Biro Umum	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			14	15,267,358	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			14	15,267,358		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	161,690		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	161,690	Biro Administrasi Pimpinan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	100,526		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	100,526	Biro Perekonomian dan Pembangunan	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	200,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	200,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	125,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	125,000	Biro Hukum	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	30,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	30,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	350,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	350,000	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	110,862		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	110,862	Biro Organisasi	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	14,189,281		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	14,189,281	Biro Umum	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			13	1,122,137	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			13	1,122,137		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	300,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	300,000	Biro Administrasi Pimpinan	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	34,909		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	34,909	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	5,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	5,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	150,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	150,000	Biro Hukum	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	16,500		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	16,500	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	54,862		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	54,862	Biro Organisasi	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	560,866		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	560,866	Biro Umum	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8	303,651	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8	303,651		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1	133,374		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1	133,374	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4	7,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4	7,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1	20,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1	20,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1	26,906		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1	26,906	Biro Organisasi	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1	116,371		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1	116,371	Biro Umum	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu			7	15,927,470	Fasilitasi Kunjungan Tamu			7	15,927,470		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	30,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	30,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	150,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	150,000	Biro Hukum	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	16,500		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	16,500	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	15,730,970		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	15,730,970	Biro Umum	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			11	10,460,188	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			11	10,460,188		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1,291,772		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1,291,772	Biro Administrasi Pimpinan	
		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1,874,040		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1,874,040	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	800,000		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	800,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	600,000		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	600,000	Biro Hukum	
		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	400,000		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	400,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1,800,288		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1,800,288	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1,178,678		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1,178,678	Biro Organisasi	
		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	2,515,410		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	2,515,410	Biro Umum	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			2	815,321	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			2	815,321		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	175,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	175,000	Biro Administrasi Pimpinan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	640,321		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	640,321	Biro Umum	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			2	658,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			2	658,000		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	350,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	350,000	Biro Administrasi Pimpinan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	308,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	308,000	Biro Umum	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	36,211,667	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	36,211,667		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2	7,875,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2	7,875,000		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	2,500,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	2,500,000	Biro Umum	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	575,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	575,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	9	4,200,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	9	4,200,000	Biro Administrasi Pimpinan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	600,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	600,000	Biro Hukum	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Kepulauan Riau		30	23,338,140	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Kepulauan Riau		30	23,338,140		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	30	23,338,140		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	30	23,338,140	Biro Umum	
	Pengadaan Mebel			18	3,658,571	Pengadaan Mebel			18	3,658,571		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	59,780		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	59,780	Biro Perekonomian dan Pembangunan	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	200,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	200,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	300,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	300,000	Biro Hukum	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	50,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	50,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	550,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	550,000	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	2,498,791		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	2,498,791	Biro Umum	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			46	1,207,043	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			46	1,207,043		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	14	350,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	14	350,000	Biro Administrasi Pimpinan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1	50,056		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1	50,056	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4	50,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4	50,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4	200,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4	200,000	Biro Hukum	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3	53,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3	53,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8	350,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8	350,000	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	12	153,987		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	12	153,987	Biro Organisasi	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1	132,912	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1	132,912		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	132,912		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	132,912	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	56,747,288	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	56,747,288		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6	983,749	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6	983,749		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	85,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	85,000	Biro Administrasi Pimpinan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2,000	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	5,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	5,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	50,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	50,000	Biro Hukum	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1,500		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1,500	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	840,249		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	840,249	Biro Umum	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			8	11,813,221	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			8	11,813,221		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	200,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	200,000	Biro Administrasi Pimpinan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	42,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	42,000	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	15,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	15,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2	71,091		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2	71,091	Biro Hukum	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	3,500		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	3,500	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	3,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	3,000	Biro Organisasi	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	11,478,630		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	11,478,630	Biro Umum	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7	11,465,518	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7	11,465,518		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	300,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	300,000	Biro Administrasi Pimpinan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	96,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	96,000	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	91,226		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	91,226	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	48,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	48,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	350,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	350,000	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	93,240		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	93,240	Biro Organisasi	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	10,487,052		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	10,487,052	Biro Umum	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			8	32,484,800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			8	32,484,800		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	3,294,937		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	3,294,937	Biro Administrasi Pimpinan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	875,635		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	875,635	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	1,243,025		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	1,243,025	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	542,480		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	542,480	Biro Hukum	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	925,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	925,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	660,213		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	660,213	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	1,063,663		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	1,063,663	Biro Organisasi	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	23,879,847		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	23,879,847	Biro Umum	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	38,823,641	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	38,823,641		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			84	2,706,009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			84	2,706,009		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	234,123		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2	234,123	Biro Administrasi Pimpinan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12	148,201		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12	148,201	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	200,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	200,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	200,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	200,000	Biro Hukum	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15	311,982		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15	311,982	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7	500,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7	500,000	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4	336,233		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4	336,233	Biro Organisasi	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	38	775,470		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	38	775,470	Biro Umum	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			191	9,147,094	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			191	9,147,094		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	300,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	300,000	Biro Hukum	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	189	8,847,094		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	189	8,847,094	Biro Umum	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pemeliharaan Mebel	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah mebel yang dipelihara	355	1,209,465	Pemeliharaan Mebel	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah mebel yang dipelihara	355	1,209,465	Biro Umum	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			137	7,787,814	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			137	7,787,814		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	65	150,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	65	150,000	Biro Administrasi Pimpinan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	2	34,500		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	2	34,500	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	50,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	50,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30	110,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30	110,000	Biro Hukum	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16	10,400		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16	10,400	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	14	32,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	14	32,000	Biro Organisasi	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	7,400,914		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	7,400,914	Biro Umum	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			7	1,399,169	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			7	1,399,169		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	7	1,399,169		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	7	1,399,169	Biro Umum	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			21	16,524,090	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			21	16,524,090		
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	250,000		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	250,000	Biro Administrasi Pimpinan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1,219,774		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1,219,774	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	2,430,151		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	2,430,151	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	12,624,165		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	12,624,165	Biro Umum	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	50,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	50,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	7,008,353	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	7,008,353	Biro Umum	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	378,941	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	378,941	Biro Umum	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6	487,300	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6	487,300	Biro Umum	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	142,112	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	142,112	Biro Umum	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	6,000,000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	6,000,000	Biro Umum	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100	9,799,914	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100	9,799,914	Biro Umum	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1	4,638,082	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1	4,638,082	Biro Umum	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	2,954,885	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	2,954,885	Biro Umum	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1	2,206,947	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1	2,206,947	Biro Umum	
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100	7,630,039	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100	7,630,039		
	Penyiapan Materi Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang disiapkan	1	401,907	Penyiapan Materi Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang disiapkan	1	401,907	Biro Administrasi Pimpinan	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			4	5,132,010	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			4	5,132,010		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1	2,072,065		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1	2,072,065	Biro Administrasi Pimpinan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1	1,055,588		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1	1,055,588	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1	105,118		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1	105,118	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1	1,899,238		Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1	1,899,238	Biro Umum	
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1	2,096,122	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1	2,096,122	Biro Administrasi Pimpinan	
	Fasilitas Keprotokolan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Fasilitas Keprotokolan sesuai SOP	100	7,735,883	Fasilitas Keprotokolan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Fasilitas Keprotokolan sesuai SOP	100	7,735,883	Biro Administrasi Pimpinan	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1	3,350,857	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1	3,350,857	Biro Administrasi Pimpinan	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	3,037,988	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	3,037,988	Biro Administrasi Pimpinan	
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hubungan Keprotokolan	1	1,347,038	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hubungan Keprotokolan	1	1,347,038	Biro Administrasi Pimpinan	
	Program Penataan Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	43.10	2,118,547	Program Penataan Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	43.10	2,118,547	Biro Organisasi	
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100	713,305	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100	713,305	Biro Organisasi	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1	241,132	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1	241,132	Biro Organisasi	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1	162,173	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1	162,173	Biro Organisasi	
	Penataan Analisis Jabatan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1	310,000	Penataan Analisis Jabatan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1	310,000	Biro Organisasi	
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100	1,405,242	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100	1,405,242	Biro Organisasi	
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	320,000	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	320,000	Biro Organisasi	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1	235,242	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1	235,242	Biro Organisasi	
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1	255,000	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1	255,000	Biro Organisasi	
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1	280,000	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1	280,000	Biro Organisasi	
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1	315,000	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1	315,000	Biro Organisasi	
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau	3.05	2,103,603	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau	3.05	2,103,603	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	100	687,765	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	100	687,765	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1	47,098	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1	47,098	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1	540,668	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1	540,668	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1	100,000	Fasilitasi Penataan Wilayah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1	100,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah	100	665,838	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah	100	665,838	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1	90,000	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1	90,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1	75,838	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1	75,838	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1	500,000	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1	500,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah	100	750,000	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah	100	750,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1	450,000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1	450,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1	150,000	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1	150,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1	150,000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1	150,000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	80	166,186,720	Program Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	80	166,186,720	Biro Kesejahteraan Rakyat	
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	100	143,287,173	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	100	143,287,173	Biro Kesejahteraan Rakyat	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	105,724,547	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	105,724,547	Biro Kesejahteraan Rakyat	
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	6	37,562,627	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	6	37,562,627	Biro Kesejahteraan Rakyat	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100	21,818,714	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100	21,818,714	Biro Kesejahteraan Rakyat	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	21,098,159	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	21,098,159	Biro Kesejahteraan Rakyat	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1	360,278	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1	360,278	Biro Kesejahteraan Rakyat	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1	360,278	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1	360,278	Biro Kesejahteraan Rakyat	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100	1,080,833	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	100	1,080,833	Biro Kesejahteraan Rakyat	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1	360,278	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1	360,278	Biro Kesejahteraan Rakyat	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1	360,278	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1	360,278	Biro Kesejahteraan Rakyat	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1	360,278	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1	360,278	Biro Kesejahteraan Rakyat	
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	100	2,113,138	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	100	2,113,138	Biro Hukum	
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	100	1,300,000	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	100	1,300,000	Biro Hukum	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	4	420,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	4	420,000	Biro Hukum	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	4	250,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	4	250,000	Biro Hukum	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Produk Hukum yang didokumentasi dan dikelola Informasi Hukumnya	3	200,000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Produk Hukum yang didokumentasi dan dikelola Informasi Hukumnya	3	200,000	Biro Hukum	
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	3	430,000	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	3	430,000	Biro Hukum	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	100	813,138	Fasilitasi Bantuan Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	100	813,138	Biro Hukum	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Masalah Hukum yang diselesaikan	8	413,138	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Masalah Hukum yang diselesaikan	8	413,138	Biro Hukum	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	6	400,000	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	6	400,000	Biro Hukum	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase koordinasi pada penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah	90	1,414,963	Program Perekonomian dan Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase koordinasi pada penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah	90	1,414,963	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	100	321,732	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	100	321,732	Biro Perekonomian dan Pembangunan	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1	163,002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1	163,002	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1	158,730	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1	158,730	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	100	400,529	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	100	400,529	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1	133,214	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1	133,214	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1	134,102	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1	134,102	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1	133,213	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1	133,213	Biro Perekonomian dan Pembangunan	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	100	692,703	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	100	692,703	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1	163,485	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1	163,485	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1	132,017	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1	132,017	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1	132,400	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1	132,400	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1	132,400	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1	132,400	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1	132,400	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1	132,400	Biro Perekonomian dan Pembangunan	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase regulasi tentang pelaksanaan APBD yang disusun	97	633,587	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase regulasi tentang pelaksanaan APBD yang disusun	97	633,587	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100	373,587	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100	373,587	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1	125,000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1	125,000	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1	95,000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1	95,000	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1	153,587	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1	153,587	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100	260,000	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100	260,000	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1	66,000	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1	66,000	Biro Perekonomian dan Pembangunan	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	65,500	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	65,500	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1	128,500	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1	128,500	Biro Perekonomian dan Pembangunan	
	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	70.5	2,165,715	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	70.5	2,165,715	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100	750,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100	750,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	12	200,000	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	12	200,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	200,000	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	200,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12	350,000	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12	350,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100	650,000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100	650,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	12	250,000	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	12	250,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12	250,000	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12	250,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12	150,000	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12	150,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100	765,715	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100	765,715	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	40	350,000	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	40	350,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	200,000	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	200,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	12	215,715	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	12	215,715	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
					484,494,352					484,494,352		



2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Mengingat peranan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak langsung menjalankan program dan kegiatan usulan masyarakat. Peranan Sekretariat Daerah dalam hal ini adalah mengkoordinasikan usulan-usulan masyarakat yang masuk ke Sekretariat Daerah kepada Instansi Teknis/Perangkat Daerah teknis yang menangani. Namun usulan masyarakat biasanya masuk melalui aspirasi atau reses lembaga legislatif dalam bentuk bantuan sosial ataupun hibah barang/dana yang biasanya dipergunakan untuk pengelolaan sarana dan prasarana ibadah yang berada di Biro Kesejahteraan Rakyat termasuk bantuan kendaraan/barang lainnya yang dikelola oleh Biro Umum. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat secara langsung dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dari Para Pemangku Kepentingan
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Program Kesejahteraan Rakyat; Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual; Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual.	1	Hibah Renovasi Mushola Nurul Jamil. Jl. MT Haryono Perum Sinar Indah 1 RT007 RW004 Leho Kel. Teluk Uma Kec Tebing, Kab Karimun	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pokir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		2	Hibah Renovasi Mushola Al Arif. Jl. Suprpto Gang Teralis RT002 RW001 Kel. Parit Benut, Kec Meral, Kab Karimun	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pokir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		3	Hibah Renovasi Mushola PKSB Kec Karimun	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pokir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		4	Hibah Renovasi Mesjid Baitul Karim Karimun	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pokir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		5	Hibah Renovasi Mesjid Al Kiram. Tiban 1 Batam	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pokir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		6	Hibah Renovasi Surau Nurul Yaqin. Jl. Kolam Air Kel. Tg Batu Kota Kec Kundur Kab Karimun	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pokir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		7	Hibah Renovasi Gedung Keluarga Magek Tilatang Kamang (KMTK). Jl Telaga Harapan Kel. Sungai Lakam Barat Kab Karimun	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pokir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		8	Hibah Renovasi Mesjid SATDIK 1. Jl. Diponegoro No. 43 Kampung Jeruk, Tanjung Uban, Bintan Utara, Kepulauan Riau	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pokir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		9	Hibah Masjid. Perum Taman harapan Indah RW 017 Kel. Sunagi Harapan Kec Sekupang Kota Batam	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pokir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		10	Hibah Masjid Nurul Yaqin. Yayasan Masjid Nurul Yaqin. Perum GPI Anggrek RT 007 RW 010 Kel. Tiban Indah kec. Sekupang Kota Batam	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pikir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		11	Hibah Pembangunan gedung TPQ. Yayasan Masjid Baiturrahim Perum Pondok Pelangi RT 003 RW 009 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pikir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		12	Hibah pengadaan tenda, kursi, tempat sampah dan perbaikan fasum di lingkungan Sekupang. Yayasan Ganda Suli Persada, Tiban BTN Blok H No 1 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pikir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		13	Hibah pengadaan tenda, kursi, tempat sampah dan perbaikan fasum di lingkungan Kec. Sagulung dan Batu Aji. Yayasan Karya Bakti Putra Batam, Perum Taman Teratai Blok F No 12 Kel. Sungai Langkai	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pikir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		14	Hibah Masjid Al Fattah. Sagulung Kota Batam Masjid Al Fattah, RT 002 RW 011 Kel Sungai Lekop Kec. Sagulung Kota Batam	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pikir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		15	Hibah Gereja Kristen Oikumene (GKOI) Jemaat Graha Legenda Malaka. Jl. Raja Khalid Hitam Blok F No. 5 RT 002 /RW 04 kel. Baloi Permai, Kec. Batam	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pikir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		16	Hibah Gereja Huria Kristen Indonesia Protestan (HKIP) Getsename. Dapur 12 , Sagulung Batam	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pikir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		17	Hibah Yayasan Kaki Dian Batam. Buana Vista Blok C NO 56Kel, Belian, Kec. Batam Kota	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pikir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		18	Hibah Yayasan Pelangi Bahtera Nuh. Ruko Bukit Golf B3 no. 5, Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pikir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		19	Hibah Gereja HKBP Agape Resort Barelang. Komp. Gereja HKBP Agape No 68 Bengkong, Kel. Tanjung Buntung, Kec. Bengkong, Batam	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pikir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		20	Hibah Yayasan Pemulih Hidup. Komp. Ruko Family Dream Blok AE No. 11, Kel. Belian, Kec Batam Kota	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pikir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		21	Hibah Yayasan Grace Smart, Batam	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pokir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		22	Hibah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Jl. Prof Dr. Hamka No. 4 Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Batam	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pokir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		23	Hibah Kepada Yayasan Nizam Al-Mulk Batam	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pokir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		24	Hibah Kepada Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Batam	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pokir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		25	Hibah Kepada Mushola An Nafi'ah Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang , Batam	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pokir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		26	Hibah Kepada TPQ AL-Zahra Kav, Saguba Kel. Sungai Binti Kec. Sagulung	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pokir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		27	Hibah Kepada Yayasan Nur Aylin Inayah. Perumahan Marina View, Blok. E2 No.17 Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji, Batam	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pokir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah
		28	Hibah Kepada Dewan Pimpinan Daerah Majelis Dakwah Islamiyah Kota Batam Kepulauan Riau	Persentase Rumah Ibadah yang dibantu Pemprov Kepri melalui Dana Hibah	1 Paket	Usulan pokir hibah dana bidang keagamaan/hibah tempat ibadah



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini berpedoman pada Rencana Awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2025 dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan juga Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, sehingga dapat dikatakan bahwa Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 bersinergi sampai ke dokumen perencanaan di atasnya.

Respon Renja Sekretariat Daerah terhadap program nasional dan program Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebagai berikut:

- Pada saat ini penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sedang berlangsung dan sudah sampai pada tahap penyampaian di Badan Anggaran DPR RI dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sedangkan sasaran dari RKP Tahun 2025 antara lain yaitu meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju, mengurangi kemiskinan menuju nol persen, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia serta pengaruh internasional. Selain pertumbuhan ekonomi, RKP 2025 juga menekankan pentingnya pembangunan manusia dan pengurangan ketimpangan. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 7–8 persen dan rasio Gini menjadi 0,379–0,382 pada Tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah akan memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial, dan mendorong konvergensi program antar lembaga. Selain itu, Pemerintah juga akan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan jaminan sosial. Hal ini sejalan dengan rencana Kementerian Perencanaan



Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025 sendiri memasukan 2 (dua) substansi utama yaitu yang pertama bagaimana RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045, atau Indonesia Emas 2045, dapat tercapai di dalam pondasi lima tahun pertama dari pembangunan yang itu disusun di dalam dokumen RPJMN 2025-2029. Lalu substansi utama yang kedua yaitu adanya penuangan Visi, Misi dan Program Presiden terpilih pada tahun 2024 ini ke dalam RPJMN 2025-2029. 2 Substansi utama ini secara tidak langsung sudah sinkron dan mengarah sesuai dengan seluruh Misi yang ada pada Perubahan RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026;

- Tema Pembangunan Daerah Tahun 2025 pada RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yaitu Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan Dalam Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan.
- Sedangkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 pada RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 terbagi dalam 3 prioritas yaitu: Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah, Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya, dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Dengan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan



dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana deskripsi pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Tahun 2025
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Perkiraan Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya peningkatan kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan terhadap pimpinan daerah dan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase kebutuhan pimpinan daerah dan perangkat daerah yang difasilitasi	100%	100%
		Meningkatnya layanan keprotokolan dan penyiapan materi serta dokumentasi pimpinan	Persentase layanan keprotokolan dan penyiapan materi serta dokumentasi pimpinan yang difasilitasi	98%	99%
		Meningkatnya hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemprov Kepri	Persentase peningkatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah	86%	93%
		Meningkatnya efektivitas tata kelola di bidang pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah yang difasilitasi penyusunannya	95%	98%
		Meningkatnya efektivitas tata kelola di bidang kesejahteraan rakyat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	60%	80%
		Meningkatnya efektivitas tata kelola di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum	Persentase produk hukum daerah dan kasus hukum daerah yang difasilitasi	100%	100%
		Meningkatnya implementasi kebijakan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan yang dihasilkan	92.3%	93.5%
		Meningkatnya capaian pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan E-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Tata Pengadaan	Baik	Baik



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, menguraikan program, kegiatan dan sub kegiatan awal yang menjadi prioritas pada Tahun 2025 beserta perkiraan target kinerja dan prakiraan maju kebutuhan anggaran tahun 2025 sebelum ditetapkan menjadi dokumen defenitif Renja setelah ditetapkannya RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Renja ini juga disusun berpedoman kepada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran kegiatan yang terdapat di dalam program harus memiliki rincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dibutuhkan dalam uraian kebijakan tersebut.

Program yang dirumuskan sebaiknya memenuhi kriteria yang merupakan penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana, bentuk penjabaran lebih rinci langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan serta mengikat/mengelompokkan kegiatan dan sub kegiatan sejenis.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi.



Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut maka dirumuskan Misi untuk mencapainya. Secara umum, tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berpedoman kepada Misi ke-2, yaitu: Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan dan Berwawasan Lingkungan.

Adapun Rekapitulasi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2023 berdasarkan RKPD Tahun 2025 terdiri dari:

- Jumlah Biro : 8
- Jumlah Program : 8
- Jumlah Kegiatan : 30
- Jumlah Sub Kegiatan : 117
- Pagu indikatif RKPD : Rp. 484.494.351.585,-
- Pagu sesuai kebutuhan : Rp. 484.494.351.585,-
- Pagu Setda T.A. 2024 : Rp. 394.126.534.003,-

Adapun rincian program dan kegiatan indikatif pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel 4.1.

TABEL 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah	%		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	100%	307,758,078,097	APBD		100%	325,108,147,602	Pembanguna n Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		Provinsi Kepulauan Riau	100%	3,171,293,688	APBD		100%	3,374,441,771	Pembanguna n Infrastruktur Wilayah
X	XX	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7	763,086,700	APBD		7	821,935,700	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Biro Administras i Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau	6	452,466,700	APBD		6	502,466,700	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Biro Kesejahtera an Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau	1	310,620,000	APBD		1	319,469,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Biro Kesejahtera an Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau	1	250,854,000	APBD		1	262,922,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Biro Perekonomi an dan Pembangun an	Provinsi Kepulauan Riau	1	217,455,848	APBD		1	217,455,848	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					15	1,731,668,840			15	1,813,899,923	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Biro Administras i Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau	2	35,000,000	APBD		2	45,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Biro Perekonomi an dan Pembangun an	Provinsi Kepulauan Riau	1	273,888,710	APBD		1	273,888,710	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	3	150,000,000	APBD		3	200,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	2	150,000,000	APBD		2	150,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Biro Pemerintah an dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	2	100,000,000	APBD		2	100,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Biro Kesejahtera an Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau	1	170,000,000	APBD		1	175,600,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Biro Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau	2	608,205,360	APBD		2	608,205,360	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	2	244,574,770	APBD		2	261,205,853	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Biro Administras i Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau	1	208,228,300	APBD		1	258,228,300	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	100%	78,688,751,704	APBD		100%	85,657,172,027	Pembanguna n Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bul an	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	3990	73,797,568,756	APBD		4060	80,446,988,637	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	1	3,772,429,120	APBD		1	4,015,354,300	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	1	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	1	624,227,489	APBD		1	666,674,959	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	1	246,000,659	APBD		1	262,728,705	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	1	67,600,000	APBD		1	72,196,800	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	1	67,600,000	APBD		1	72,196,800	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	3	113,325,680	APBD		3	121,031,826	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	100%	1,909,515,528	APBD		100%	2,025,762,585	Pembanguna n Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	1	55,002,480	APBD		1	58,742,649	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	1	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	1	936,150,829	APBD		1	986,209,086	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	1	169,986,440	APBD		1	181,545,518	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	1	66,848,080	APBD		1	71,393,749	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	1	681,527,699	APBD		1	727,871,583	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	100%	5,410,961,744	APBD		100%	5,648,380,475	Pembanguna n Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					22	1,843,830,059			23	1,984,310,939	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Biro Administrasi Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau	3	350,000,000	APBD		3	400,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Biro Perekonomian dan Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	3	170,630,000	APBD		3	170,630,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	3	200,000,000	APBD		4	300,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	3	100,000,000	APBD		3	100,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Biro Pemerintah an dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	1,000,000	APBD		1	1,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Biro Kesejahtera an Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau	2	250,527,000	APBD		2	262,569,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Biro Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau	1	190,436,000	APBD		1	142,950,760	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	6	581,237,059	APBD		6	607,161,179	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					2	416,489,061			2	446,210,318	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	1	216,489,061	APBD		1	231,210,318	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Biro Administras i Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau	1	200,000,000	APBD		1	215,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	1	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					162	1,808,188,470			174	1,807,122,711	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Biro Administras i Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	39	350,000,000	APBD		44	400,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Biro Perekonomi an dan Pembangun an	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	20	190,220,750	APBD		25	190,220,750	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	45	157,500,000	APBD		45	160,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	6	80,000,000	APBD		6	80,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Biro Pemerintah an dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	7	50,000,000	APBD		7	50,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Biro Kesejahtera an Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	10	400,273,000	APBD		10	416,294,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Biro Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	5	230,000,000	APBD		5	150,200,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	30	350,194,720	APBD		32	360,407,961	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					170	705,282,170			170	727,536,828	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Biro Perekonomian dan Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	30	166,537,200	APBD		30	166,537,200	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	40	75,000,000	APBD		40	80,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	50	210,000,000	APBD		50	210,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	50	253,744,970	APBD		50	270,999,628	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	1	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					190	637,171,984			200	683,199,679	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	40	75,000,000	APBD		40	80,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Biro Administrasi Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	20	150,000,000	APBD		25	180,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	50	150,000,000	APBD		50	150,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	80	262,171,984	APBD		85	273,199,679	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	100%	54,620,770,618	APBD		100%	58,292,972,985	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5	52,000,000			5	52,000,000	

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	4	50,000,000	APBD		4	50,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	Biro Pemerintah an dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	2,000,000	APBD		1	2,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					13	7,792,614,130			13	8,234,307,891	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	4	120,000,000	APBD		4	150,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	6	300,000,000	APBD		6	350,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	Biro Pemerintah an dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	83,000,000	APBD		1	85,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	2	7,289,614,130	APBD		2	7,649,307,891	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	1	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					9	2,222,030,660			7	2,370,555,497	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	Biro Administras i Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau	1	282,460,000	APBD		1	332,460,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	Biro Perekonomi an dan Pembangun an	Provinsi Kepulauan Riau	1	110,676,000	APBD		1	110,676,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	5	100,000,000	APBD		3	150,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	Biro Pemerintah an dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	30,000,000	APBD		1	31,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	1	1,698,894,660	APBD		1	1,746,419,497	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	1	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					14	15,267,358,142			14	16,101,148,047	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	Biro Administrasi Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau	1	161,690,000	APBD		1	211,690,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	Biro Perekonomian dan Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	1	100,525,879	APBD		1	103,373,900	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	4	200,000,000	APBD		4	200,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	4	125,000,000	APBD		4	175,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	30,000,000	APBD		1	31,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	Biro Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau	1	350,000,000	APBD		1	362,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	1	110,861,564	APBD		1	169,932,360	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket		Provinsi Kepulauan Riau	1	14,189,280,699	APBD		1	14,848,151,787	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					13	1,122,136,976			13	1,228,975,883	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	Biro Administrasi Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau	1	300,000,000	APBD		1	345,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	Biro Perekonomian dan Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	1	34,908,700	APBD		1	34,908,700	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	4	5,000,000	APBD		4	5,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	4	150,000,000	APBD		4	180,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	16,500,000	APBD		1	16,500,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	Biro Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau	1	54,862,000	APBD		1	55,362,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	1	560,866,276	APBD		1	592,205,183	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					8	303,651,254			8	311,564,479	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	Biro Perekonomian dan Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	1	133,373,900	APBD		1	133,373,900	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	4	7,000,000	APBD		4	7,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	20,000,000	APBD		1	20,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	Dokumen	Biro Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau	1	26,906,400	APBD		1	26,906,400	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	Dokumen	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	1	116,370,954	APBD		1	124,284,179	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					7	15,927,470,291			7	17,089,676,271	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	4	30,000,000	APBD		4	30,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	1	150,000,000	APBD		1	150,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Biro Pemerintah an dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	16,500,000	APBD		1	17,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	1	15,730,970,291	APBD		1	16,892,676,271	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					11	10,460,188,095			11	11,312,338,014	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Biro Administrasi Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	1	1,291,771,700	APBD		1	1,391,771,700	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Biro Perekonomian dan Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	1	1,874,040,000	APBD		1	1,874,040,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	4	800,000,000	APBD		4	1,070,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	1	600,000,000	APBD		1	600,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	1	400,000,000	APBD		1	400,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	1	1,800,288,455	APBD		1	1,890,866,440	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Biro Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	1	1,178,678,267	APBD		1	1,433,202,343	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	1	2,515,409,673	APBD		1	2,652,457,531	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2	815,321,070			2	870,262,903	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Biro Administras i Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau	1	175,000,000	APBD		1	200,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	1	640,321,070	APBD		1	670,262,903	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					2	658,000,000			2	722,144,000	
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Biro Administras i Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau	1	350,000,000	APBD		1	400,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	1	308,000,000	APBD		1	322,144,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		Provinsi Kepulauan Riau	100%	36,211,667,172	APBD		100%	37,088,005,198	Pembanguna n Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	1	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					12	7,875,000,000			20	7,757,179,132	
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	1	2,500,000,000	APBD		1	2,500,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	1	575,000,000	APBD		3	1,208,622,144	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	Biro Administras i Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau	9	4,200,000,000	APBD		16	4,048,556,988	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	1	600,000,000	APBD		0	-	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					30	23,338,140,360			31	24,099,102,523	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	30	23,338,140,360	APBD		30	23,549,102,523	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	0	-	APBD		1	550,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.07	0005	Pengadaan Mebel					18	3,658,571,095			10	3,696,559,006	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Biro Perekonomi an dan Pembangun an	Provinsi Kepulauan Riau	1	59,780,000	APBD		1	59,780,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	10	200,000,000	APBD		2	200,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	4	300,000,000	APBD		4	300,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Biro Pemerintah an dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	50,000,000	APBD		1	50,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Biro Kesejahtera an Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau	1	550,000,000	APBD		1	578,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	1	2,498,791,095	APBD		1	2,508,779,006	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	1	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					46	1,207,043,374			50	1,326,390,385	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	Biro Administras i Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau	14	350,000,000	APBD		18	425,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	Biro Perekonomi an dan Pembangun an	Provinsi Kepulauan Riau	1	50,056,000	APBD		1	50,056,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	4	50,000,000	APBD		3	100,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	4	200,000,000	APBD		4	200,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	Biro Pemerintah an dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	3	53,000,000	APBD		3	55,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	Biro Kesejahtera an Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau	8	350,000,000	APBD		9	362,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	Biro Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau	12	153,987,374	APBD		12	134,334,385	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	1	132,912,343	APBD		1	208,774,152	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		Provinsi Kepulauan Riau	100%	56,747,287,861	APBD		100%	58,899,388,455	Pembanguna n Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					6	983,748,679			6	1,100,885,589	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Biro Administras i Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau	1	85,000,000	APBD		1	90,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Biro Perekonomi an dan Pembangun an	Provinsi Kepulauan Riau	1	2,000,000	APBD		1	2,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Biro Pengadaa n Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	1	5,000,000	APBD		1	10,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	1	50,000,000	APBD		1	100,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Biro Pemerintah an dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	1,500,000	APBD		1	1,500,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	1	840,248,679	APBD		1	897,385,589	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					8	11,813,221,084			8	12,491,764,748	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	Biro Administras i Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau	1	200,000,000	APBD		1	215,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	Biro Perekonomi an dan Pembangun an	Provinsi Kepulauan Riau	1	42,000,000	APBD		1	42,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	1	15,000,000	APBD		1	20,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	2	71,091,332	APBD		2	81,686,653	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	Biro Pemerintah an dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	3,500,000	APBD		1	3,500,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	Biro Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau	1	3,000,000	APBD		1	6,401,520	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	1	11,478,629,752	APBD		1	12,123,176,575	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					7	11,465,517,847			7	11,797,129,407	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	Biro Administras i Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau	1	300,000,000	APBD		1	350,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	Biro Perekonomi an dan Pembangun an	Provinsi Kepulauan Riau	1	96,000,000	APBD		1	96,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	1	91,225,848	APBD		1	91,225,848	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	Biro Pemerintah an dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	48,000,000	APBD		1	48,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	Biro Kesejahtera an Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau	1	350,000,000	APBD		1	362,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	Biro Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau	1	93,240,000	APBD		1	93,240,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	1	10,487,051,999	APBD		1	10,756,663,559	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					8	32,484,800,251			8	33,509,608,711	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	Biro Administras i Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau	1	3,294,937,247	APBD		1	3,294,937,247	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	Biro Perekonomi an dan Pembangun an	Provinsi Kepulauan Riau	1	875,634,628	APBD		1	875,634,628	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	Biro Pengadaa n Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	1	1,243,024,822	APBD		1	1,243,024,822	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	1	542,480,000	APBD		1	586,480,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	Biro Pemerintah an dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	925,000,000	APBD		1	925,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	Biro Kesejahtera an Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau	1	660,212,902	APBD		1	697,029,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	Biro Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau	1	1,063,663,424	APBD		1	1,063,663,424	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	1	23,879,847,228	APBD		1	24,823,839,590	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		Provinsi Kepulauan Riau	100%	38,823,641,499	APBD		100%	40,254,094,177	Pembanguna n Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					84	2,706,009,305			84	2,832,741,266	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	Biro Administras i Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau	2	234,122,900	APBD		2	234,122,900	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	Biro Perekonomi an dan Pembangun an	Provinsi Kepulauan Riau	12	148,201,400	APBD		12	148,201,400	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	5	200,000,000	APBD		5	250,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	1	200,000,000	APBD		1	200,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	Biro Pemerintah an dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	15	311,981,600	APBD		15	311,981,600	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	Biro Kesejahtera an Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau	7	500,000,000	APBD		7	524,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	Biro Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau	4	336,233,400	APBD		4	336,233,400	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	38	775,470,005	APBD		38	828,201,966	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					191	9,147,094,165			191	10,112,696,568	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	2	300,000,000	APBD		2	300,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	189	8,847,094,165	APBD		189	9,812,696,568	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	1	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	355	1,209,465,460	APBD		360	1,223,709,111	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					137	7,787,813,912			144	8,187,876,056	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	Biro Administrasi Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau	65	150,000,000	APBD		65	175,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	Biro Perekonomian dan Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	2	34,500,000	APBD		2	44,500,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	5	50,000,000	APBD		5	50,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	30	110,000,000	APBD		30	110,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	16	10,400,000	APBD		17	11,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	Biro Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau	14	32,000,000	APBD		20	29,200,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	5	7,400,913,912	APBD		5	7,768,176,056	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	7	1,399,168,838	APBD		7	1,460,312,319	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					21	16,524,089,819			21	16,386,758,857	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Biro Administrasi Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau	1	250,000,000	APBD		1	300,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	1	1,219,774,152	APBD		1	150,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	2,430,151,105	APBD		1	2,430,151,105	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	18	12,624,164,562	APBD		18	13,506,607,752	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	1	50,000,000	APBD		1	50,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	100%	7,008,353,144	APBD		100%	7,051,678,658	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	1	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang /Bulan	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	28	378,941,250	APBD		28	401,309,255	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	6	487,299,844	APBD		6	506,836,233	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	2	142,112,050	APBD		2	143,533,170	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang /Bulan	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	24	6,000,000,000	APBD		24	6,000,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	100%	9,799,914,001	APBD		100%	10,310,095,734	Pembanguna n Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	1	4,638,082,394	APBD		1	4,865,259,577	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	1	2,954,884,781	APBD		1	3,121,816,947	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembangunan Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	1	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau	1	2,206,946,826	APBD		1	2,323,019,210	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	%		Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	100%	7,630,038,622	APBD		100%	8,329,386,365	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang disiapkan	Dokumen	Biro Administrasi Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau	1	401,906,800	APBD		1	371,906,800	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					4	5,132,009,605			4	5,711,357,348	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	Biro Administrasi Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	1	2,072,065,376	APBD		1	2,122,065,376	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	Biro Perekonomian dan Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	1	1,055,588,008	APBD		1	1,295,862,585	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	1	105,117,879	APBD		1	299,042,843	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	Biro Umum	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	1	1,899,238,342	APBD		1	1,994,386,544	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan	Biro Administras i Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	1	2,096,122,217	APBD		1	2,246,122,217	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan sesuai SOP	%	Biro Administra si Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	100%	7,735,882,516	APBD		100%	8,176,769,172	Pembanguna n Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan	Biro Administras i Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	1	3,350,856,607	APBD		1	3,580,856,607	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan	Biro Administras i Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	1	3,037,988,296	APBD		1	3,187,988,296	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
X	XX	1	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan	Biro Administras i Pimpinan	Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau	1	1,347,037,613	APBD		1	1,407,924,269	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	02			Program Penataan Organisasi	Persentase Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	%	Biro Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau	43.10	2,118,546,545	APBD		44.60	2,385,344,542	Pembanguna n Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	%	Biro Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau	100%	713,304,545	APBD		100%	815,102,542	Pembanguna n Infrastruktur Wilayah
4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	Biro Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau	1	241,132,000	APBD		1	274,132,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	Biro Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau	1	162,172,545	APBD		1	197,970,542	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	Biro Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau	1	310,000,000	APBD		1	343,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	%	Biro Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau	100%	1,405,242,000	APBD		100%	1,570,242,000	Pembanguna n Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembangunan Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	Biro Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau	1	320,000,000	APBD		1	353,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	Biro Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau	1	235,242,000	APBD		1	268,242,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan	Biro Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau	1	255,000,000	APBD		1	288,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	Biro Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau	1	280,000,000	APBD		1	313,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	Biro Organisasi	Provinsi Kepulauan Riau	1	315,000,000	APBD		1	348,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	03			Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau	Skor	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	3.05	2,103,603,168	APBD		3.06	2,361,085,302	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembangunan Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	100%	687,765,168	APBD		100%	751,085,302	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	03	1.01	0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	47,097,600	APBD		1	50,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	03	1.01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	540,667,568	APBD		1	551,085,302	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	100,000,000	APBD		1	150,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Pelaksanaan Otonomi Daerah	%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	100%	665,838,000	APBD		100%	740,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	90,000,000	APBD		1	90,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembangunan Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	75,838,000	APBD		1	100,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	500,000,000	APBD		1	550,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah	%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	100%	750,000,000	APBD		100%	870,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	450,000,000	APBD		1	550,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	03	1.03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	150,000,000	APBD		1	170,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	1	150,000,000	APBD		1	150,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	04	1.01		Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	%	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau	80%	166,186,720,139	APBD		100%	172,730,595,687	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembangunan Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	%	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau	100%	143,287,173,494	APBD		100%	148,681,049,042	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau	1	105,724,546,913	APBD		1	109,118,422,461	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	Lembaga	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau	6	37,562,626,581	APBD		6	39,562,626,581	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	%	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau	100%	21,818,713,881	APBD		100%	22,878,713,881	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau	1	21,098,158,705	APBD		1	22,098,158,705	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau	1	360,277,588	APBD		1	390,277,588	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau	1	360,277,588	APBD		1	390,277,588	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	%	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau	100%	1,080,832,764	APBD		100%	1,170,832,764	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau	1	360,277,588	APBD		1	390,277,588	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau	1	360,277,588	APBD		1	390,277,588	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	04	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	Biro Kesejahteraan Rakyat	Provinsi Kepulauan Riau	1	360,277,588	APBD		1	390,277,588	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	05			Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	%	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	100%	2,113,137,990	APBD		100%	2,375,417,181	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	05	1.01		Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan	%	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	100%	1,300,000,000	APBD		100%	1,562,279,161	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	05	1.01	0001	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	4	420,000,000	APBD		4	530,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	05	1.01	0002	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	4	250,000,000	APBD		4	300,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang didokumentasi dan dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	3	200,000,000	APBD		3	250,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	05	1.01	0004	Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	Dokumen	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	3	430,000,000	APBD		3	482,279,161	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	05	1.02		Fasilitas Bantuan Hukum	Persentase Fasilitas Bantuan Hukum	%	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	100%	813,137,990	APBD		100%	813,138,020	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembangunan Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang diselesaikan	Kasus	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	8	413,137,990	APBD		8	413,138,020	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	Kasus	Biro Hukum	Provinsi Kepulauan Riau	6	400,000,000	APBD		6	400,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	06			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase koordinasi pada penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah	%	Biro Perekonomian dan Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	90%	1,414,963,139	APBD		100%	1,445,994,952	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	%	Biro Perekonomian dan Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	100%	321,731,645	APBD		100%	321,731,645	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	Biro Perekonomian dan Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	1	163,001,870	APBD		1	163,001,870	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	Biro Perekonomian dan Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	1	158,729,775	APBD		1	158,729,775	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	%	Biro Perekonomian dan Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	100%	400,528,850	APBD		100%	400,528,850	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	Biro Perekonomi an dan Pembangun an	Provinsi Kepulauan Riau	1	133,214,400	APBD		1	133,214,400	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	06	1.02	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	Biro Perekonomi an dan Pembangun an	Provinsi Kepulauan Riau	1	134,101,600	APBD		1	134,101,600	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	Biro Perekonomi an dan Pembangun an	Provinsi Kepulauan Riau	1	133,212,850	APBD		1	133,212,850	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	%	Biro Perekono mian dan Pembangu nan	Provinsi Kepulauan Riau	100%	692,702,644	APBD		100%	723,734,457	Pembanguna n Infrastruktur Wilayah
4	01	06	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	Biro Perekonomi an dan Pembangun an	Provinsi Kepulauan Riau	1	163,485,235	APBD		1	164,485,235	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	06	1.03	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	Biro Perekonomi an dan Pembangun an	Provinsi Kepulauan Riau	1	132,017,109	APBD		1	137,017,109	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	06	1.03	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	Biro Perekonomi an dan Pembangun an	Provinsi Kepulauan Riau	1	132,400,100			1	142,400,100	
4	01	06	1.03	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	Biro Perekonomi an dan Pembangun an	Provinsi Kepulauan Riau	1	132,400,100	APBD		1	132,400,100	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	06	1.03	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Dokumen	Biro Perekonomi an dan Pembangun an	Provinsi Kepulauan Riau	1	132,400,100			1	147,431,913	
4	01	08			Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase regulasi tentang pelaksanaan APBD yang disusun	%	Biro Perekono mian dan Pembangu nan	Provinsi Kepulauan Riau	97%	633,587,301	APBD		100%	893,264,805	Pembanguna n Infrastruktur Wilayah
4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	Biro Perekono mian dan Pembangu nan	Provinsi Kepulauan Riau	100%	373,587,301	APBD		100%	473,587,301	Pembanguna n Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan	Biro Perekonomian dan Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	1	125,000,000	APBD		1	165,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	08	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan	Biro Perekonomian dan Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	1	95,000,000	APBD		1	135,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan	Biro Perekonomian dan Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	1	153,587,301	APBD		1	173,587,301	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	Biro Perekonomian dan Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	100%	260,000,000	APBD		100%	419,677,504	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	08	1.02	0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Dokumen	Biro Perekonomian dan Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	1	66,000,000	APBD		1	136,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	08	1.02	0001	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	Biro Perekonomian dan Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	1	65,500,000	APBD		1	135,177,504	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	08	1.02	0001	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	Biro Perekonomian dan Pembangunan	Provinsi Kepulauan Riau	1	128,500,000	APBD		1	148,500,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	07			Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	70.5%	2,165,715,206	APBD		71%	2,302,676,237	Pembanguna n Infrastruktur Wilayah
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	100%	750,000,000	APBD		100%	600,000,000	Pembanguna n Infrastruktur Wilayah
4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	12	200,000,000	APBD		12	200,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	12	200,000,000	APBD		12	200,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	12	350,000,000	APBD		12	200,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	100%	650,000,000	APBD		100%	850,000,000	Pembanguna n Infrastruktur Wilayah
4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	12	250,000,000	APBD		12	350,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Prioritas Pembanguna n Daerah
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	12	250,000,000	APBD		12	350,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	12	150,000,000	APBD		12	150,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	100%	765,715,206	APBD		100%	852,676,237	Pembanguna n Infrastruktur Wilayah
4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	40	350,000,000	APBD		41	350,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	12	200,000,000	APBD		12	250,000,000	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Provinsi Kepulauan Riau	12	215,715,206	APBD		12	252,676,237	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
											484,494,351,585				509,602,526,308	



BAB V

PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING

Tidak semata-mata karena memenuhi Peraturan Perundang-undangan, dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Renja ini merupakan acuan untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan didefenitifkan nantinya menjadi dokumen Renja Sekretariat Daerah dan berikutnya akan diimplementasikan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Renja juga merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja tahun sebelumnya yang tercantum dalam Rencana Strategis.

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen Renja ini merupakan tahapan awal pedoman dalam Penetapan Dokumen Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan penting dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya sampai menjelang ditetapkannya dokumen resmi Renja dan sudah menyesuaikan dokumen perencanaan di atasnya (Perubahan RPJMD, Perubahan Renstra dan RKPD) dengan memberikan arah,



tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

2. Seluruh Biro dibawah lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban untuk mempedomani dokumen Renja ini dalam menyusun dan menetapkan dokumen final Renja nantinya setelah dilaksanakan Forum SKPD/Lintas SKPD dan Musrenbang RKPD Tahun 2025;
3. Seluruh Biro dibawah lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban untuk menyusun analisis kebutuhan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas terutama pada finalisasi dokumen Renja pada saat Forum SKPD/Lintas SKPD dan Musrenbang RKPD Tahun 2025;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, seluruh biro juga diwajibkan menjabarkan Renja ke dalam Pra Kerangka Acuan Kerja masing-masing biro.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Hal-hal penting yang akan dijadikan rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran renja ini, antara lain:

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja SKPD pada saat Konsultasi Publik RKPD, Forum SKPD/Musrenbang RKPD;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar biro dan SKPD lainnya untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.



Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, meskipun perlu disampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif, dimana dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Penyusunan Renja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan sebelum ditetapkan menjadi dokumen resmi Renja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, oleh karenanya saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna finalisasi dokumen renja menjadi definitif. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah pada Tahun 2025.